

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM

NOMOR 26/ITJ.1/TU.210/I/2024

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran Kinerja
Inspektorat I Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 19 Januari 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat I Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teuku Nilwan

Tembusan:
Inspektur Jenderal



INSPEKTORAT I

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



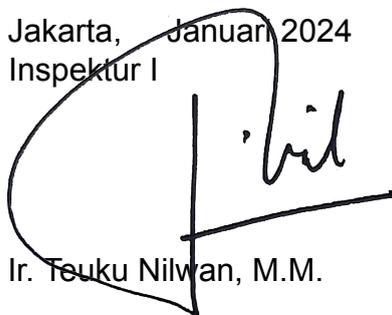
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat I dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian kinerja Inspektorat I dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja ke depan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Inspektorat I, atas kerja samanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat I selama Tahun 2023. Masukan dan kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas kinerja pengawasan intern. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat Jenderal KKP.

Jakarta, Januari 2024
Inspektur I



Ir. Teuku Nilwan, M.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana kinerja Inspektorat I difokuskan untuk mendukung kinerja Inspektorat Jenderal KKP dan diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja Inspektorat I mengacu kepada tiga Sasaran Strategis (SS), yaitu “Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan mitra Inspektorat I”, “Pengawasan intern yang handal pada mitra Inspektorat I”, dan “Dukungan manajemen pengawasan yang handal lingkup Inspektorat I”.

Capaian kinerja Inspektorat I sampai dengan posisi 31 Desember 2023, sebanyak 3 (tiga) SS dengan 13 IKU telah diukur dalam Aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), dengan capaian kinerja IKU adalah 108,24. Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat I selama Tahun 2023 baik, yaitu sebanyak 13 IKU (level 2) telah mencapai target dan bahkan beberapa diantaranya melebihi target yang telah ditentukan.

Terdapat revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 pada Triwulan IV untuk perubahan Indikator Kinerja PMPRB, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa IKU PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen PK unit kerja. Hal ini dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Road Map Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General sehingga IKU PMPRB tidak perlu lagi untuk dicantumkan. Dengan hal ini IKU level 2 yang sebelumnya 14 IKU menjadi 13 IKU.

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat I selama tahun 2023 dalam mendukung kinerja Inspektorat Jenderal KKP antara lain : Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan mitra Inspektorat I mencapai nilai 0,0001% dari target $\leq 1\%$; Tingkat Maturitas SPIP mitra Inspektorat I (Level) mencapai level 3,561 dari target level 3,1; Unit kerja mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi) mencapai 18 Unit dari target 17 Unit; Nilai Penilaian Mandiri SAKIP mitra Inspektorat I mencapai nilai 83,18 dari target 80,50; Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup mitra Inspektorat I mencapai 87,69% dari target 81%; Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat I mencapai 91,50% dari target 81%; Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup mitra Inspektorat I mencapai 91,27% dari target 81%; Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup mitra Inspektorat I mencapai 89,13% dari target 75%; Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup mitra Inspektorat I (rekomendasi) mencapai 5 rekomendasi dari target 4 rekomendasi; Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I mencapai 96,43% dari target 88%; Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I mencapai 99,09% dari target 80%; Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I mencapai 100% dari target 100%; dan Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat I mencapai 100% dari target 100%.

Dari sisi kinerja anggaran, dapat disampaikan bahwa pagu anggaran Inspektorat I TA 2023 adalah sebesar Rp4.641.604.000,00 yang telah mengalami revisi menjadi Rp4.817.252.000,00. Capaian realisasi anggaran Inspektorat I TA 2023 bernilai baik yaitu mencapai Rp4.816.843.900,00 atau 99,99% dari pagu anggaran yang dikelola.

Guna perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh Penanggung Jawab IKU dan Tim Pengelola Kinerja Inspektorat I akan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2023 sebagai pembelajaran untuk melaksanakan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tahun 2024. Seluruh Penanggung Jawab IKU dan Tim Pengelola Kinerja perlu mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada IKU yang telah mencapai target yang ditetapkan. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Inspektorat I diharapkan dapat mendukung kinerja Inspektorat I yang lebih baik lagi di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PROGRAM KERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT I.....	1
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. SUMBER DAYA.....	3
E. DASAR PENGUKURAN KINERJA	4
F. MAKSUD DAN TUJUAN	5
G. RUANG LINGKUP.....	5
H. WAKTU PENGUKURAN KINERJA	5
I. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA.....	5
J. SISTEMATIKA LAPORAN.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS ITJEN KKP TAHUN 2020 - 2024	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
C. PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2022.....	9
D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. PENGELOLAAN KINERJA	12
B. CAPAIAN KINERJA LEVEL II.....	12
C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN	34
D. REALISASI RENCANA AKSI	40

BAB IV PENUTUP	41
A. KESIMPULAN	41
B. RENCANA PERBAIKAN.....	41
C. SARAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat I Tahun 2023	3
Tabel 2.	Penetapan Kinerja Inspektorat I TA 2023	10
Tabel 3.	Rentang Penilaian Capaian Kinerja	12
Tabel 4.	Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2023	14
Tabel 5.	Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal (BPK-RI) pada Mitra Inspektorat I	15
Tabel 6.	Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas Mitra Inspektorat I dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024	17
Tabel 7.	Perkembangan Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Level)	18
Tabel 8.	Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024	18
Tabel 9.	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (Jumlah Akumulasi)	18
Tabel 10.	Perkembangan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I	20
Tabel 11.	Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Mitra Inspektorat I Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024	21
Tabel 12.	Perbandingan Target dan Capaian IKU Sasaran Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I Tahun 2023	22
Tabel 13.	Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I	23
Tabel 14.	Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I Dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024	24
Tabel 15.	Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I	25
Tabel 16.	Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I dari Tahun 2020 sampai dengan Target Tahun 2024	25

Tabel 17.	Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I	26
Tabel 18.	Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I dari Tahun 2020 dan dengan Target Tahun 2024	28
Tabel 19.	Perkembangan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Mitra Inspektorat I	28
Tabel 20.	Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Mitra Inspektorat I dari Tahun 2020 dan dengan Target Tahun 2024	29
Tabel 21.	Perkembangan Jumlah rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	29
Tabel 22.	Perkembangan Capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I	30
Tabel 23.	Perkembangan Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Inspektorat I	31
Tabel 24.	Perbandingan Capaian Persentase KMP lingkup Inspektorat I dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024	31
Tabel 25.	Rincian Capaian Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan PKP pada Inspektorat I Tahun 2023	32
Tabel 26.	Perkembangan Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I	32
Tabel 27.	Perbandingan Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024	33
Tabel 28.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2023	33
Tabel 29.	Target dan Realisasi IKU 13	34
Tabel 30.	Realisasi Anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (Setelah Revisi)	35
Tabel 31.	Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat I TA 2018-2023	36
Tabel 32.	Sasaran Kinerja dan Realisasi Anggaran Inspektorat I TA 2023	36
Tabel 33.	Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat I TA 2018-2023	37
Tabel 34.	Efisiensi Anggaran Itjen KKP Tahun 2023 per Jenis Capaian Kinerja	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat I Tahun 2023	4
Gambar 2. Capaian Kinerja IKU Inspektorat I Tahun 2023	13

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Piagam Audit Intern memberikan mandat kepada Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan, akuntabilitas tata kelola, dan penerapan budaya integritas pada unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga mendapat mandat untuk meningkatkan kapabilitasnya selaku pengawas intern. Hal ini menjadi penting mengingat kapabilitas yang memadai dari Itjen dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja KKP.

Dalam rangka menyelaraskan dengan mandat yang diberikan, tugas dan fungsi Itjen KKP dilaksanakan secara sistematis melalui manajemen kinerja yang terarah, terukur, dan terstruktur. Manajemen kinerja dimulai dengan penentuan arah dan fokus pelaksanaan kinerja Itjen melalui pembangunan Visi, Misi, dan Tujuan. Selanjutnya arah kinerja tersebut diformulasikan menjadi sasaran-sasaran yang diukur melalui indikator-indikator yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja. Dalam implementasinya, sasaran dan indikator kinerja menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja lingkup Itjen KKP.

Melalui manajemen kinerja yang sistematis dan terstruktur, pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara terukur dan berkala. Dalam hal ini, Inspektorat I selaku salah satu unit pelaksana kinerja Itjen KKP melakukan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap tiga bulan untuk memastikan perkembangan capaian kinerja sesuai dengan harapan. Sebagai bentuk pengendalian, hasil pengukuran dan evaluasi kinerja disajikan dalam laporan yang disampaikan kepada pimpinan. Di mana laporan kinerja tersebut selanjutnya menjadi dasar pengambilan kebijakan atau aksi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan.

B. PROGRAM KERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT I

Inspektorat I melaksanakan agenda pembangunan nasional berupa Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada mitra lingkup Inspektorat I, melalui Program

Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP, dengan melaksanakan proses pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Probity Audit
2. Audit Kinerja pada Mitra Inspektorat I
3. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis pada Mitra Inspektorat I
4. Pengawasan Aset/BMN
5. Pengawasan Tematik
6. Pengawasan Kinerja Manajerial pada Mitra Inspektorat I
 - a. Benturan Kepentingan
 - b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
 - c. Pelayanan Publik
 - d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - e. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
7. Pengawasan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran pada Mitra Inspektorat I
8. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Mitra Inspektorat I

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

3. Pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi pengawasan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Pelaporan hasil pengawasan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

D. SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat I didukung oleh sejumlah sumber daya dengan gambaran sebagai berikut:

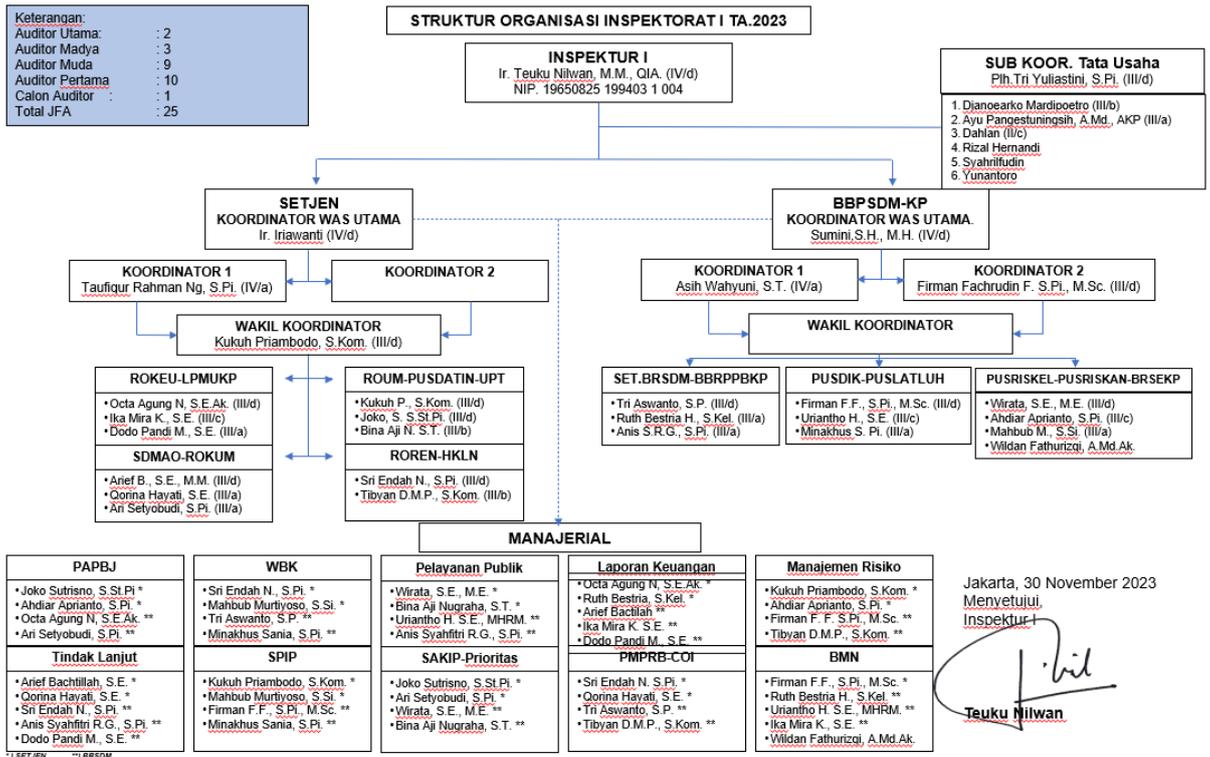
1. Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur Inspektorat I pada tahun 2023 mencapai 33 orang yang terdiri dari:

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat I Tahun 2023

Jabatan	Jumlah
Inspektur	1 orang
Auditor Utama	2 orang
Auditor Madya	3 orang
Auditor Muda	9 orang
Auditor Pertama	10 orang
Calon Auditor	1 orang
Staf Tata Usaha	7 orang
Jumlah	33 orang

Adapun struktur organisasi Inspektorat I tahun 2023 berjalan sebagaimana gambar diagram berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat I Tahun 2023

2. Anggaran

Dari sisi keuangan, pada tahun 2023 Inspektorat I didukung anggaran sebesar Rp4.641.604.000,00 yang telah mengalami revisi menjadi Rp4.817.252.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan dukungan operasional pengawasan.

E. DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja.

4. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 43 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : SP DIPA – 032.02.0/2023 tanggal 30 November 2022.

F. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat I dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d. Desember) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun tujuan dari laporan ini adalah untuk menyampaikan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja Inspektorat I.

G. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran terhadap dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat I dan Perjanjian Kinerja Level 2 yang disepakati Inspektur I dengan Inspektur Jenderal KKP.

H. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d Desember 2023
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Desember 2023

I. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Inspektorat I berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis *Balanced Score Card* (BSC) Inspektorat I Tahun 2023.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi dalam pencapaian IKK Inspektorat I Tahun 2023.

J. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: Pendahuluan mengenai latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Akuntabilitas Kinerja periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dan penutup yang merupakan kesimpulan dari isi laporan serta saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ITJEN KKP TAHUN 2020 - 2024

Rencana Strategis Itjen KKP mengalami beberapa perubahan disesuaikan dinamika organisasi. Perubahan terakhir, terkait penajaman Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi Itjen Renstra 2020 – 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi

Keadaan yang ingin dicapai oleh Itjen KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Itjen KKP adalah:

“Menjadi katalisator pembaharuan kinerja KKP”

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan pimpinan Itjen untuk menjadikan pengawas intern menjadi motor penggerak yang dapat mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KKP. Dengan Visi tersebut, Itjen diarahkan untuk tidak hanya memberikan *Quality Assurance* namun juga *Advisory Services* bagi mitra kerja.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari pimpinan dan aparatur Itjen KKP. Di samping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerja sama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2. Misi

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen adalah:

“Memberikan Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran operasional dari Visi yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

“Peningkatan Efektivitas Peran Pengawasan Internal”

Melalui peningkatan efektivitas peran pengawasan internal, diharapkan kinerja KKP dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan program-program pembangunan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan menjadi sasaran dan indikator kinerja yang dibagi atau diturunkan ke masing-masing unit kerja lingkup Itjen sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP pada Tahun 2023, Inspektorat I melaksanakan kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.817.252.000,00 dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sebanyak 2 Laporan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut antara lain:

1. Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.428.274.000 terdiri atas:
 - a. Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.577.647.000,00;
 - b. Pengawasan Akuntabilitas Non Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp676.802.000,00;
 - c. Dukungan Operasional Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.173.825.000,00;
 - d. Pencadangan AA dengan alokasi anggaran sebesar Rp739.543.000,00, namun alokasi anggaran ini di revisi.
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.388.978.000,00 terdiri atas:

- a. Persiapan Pelaksanaan Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.465.000,00;
- b. Pelaksanaan Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.384.513.000,00;

C. PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2023

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja Itjen, Inspektorat I selaku unit pelaksana pengawasan internal pada Sekretariat Jenderal (SETJEN) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) mendapatkan tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Ketiga Sasaran strategis tersebut diukur keberhasilan capaiannya dengan 14 indikator kinerja dengan target-target yang telah ditentukan dan diperjanjikan, namun pada Triwulan IV telah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja untuk perubahan Indikator Kinerja PMPRB. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, Tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa IKU PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen PK unit kerja. Sasaran dan indikator kinerja Inspektorat I yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat I TA 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Target
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I	≤1%
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I	Level 3,1
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	17 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I (*)	33
		5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I	80,50 (A)
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I	6	Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I	81%
		7	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I	81%
		8	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I	81%
		9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I	75%
		10	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4 Rekom
		11	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I	88%
		12	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I	80%
3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat I	13	Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I	100%
		14	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I	100%

Catatan : (*) Pada Triwulan terjadi revisi PK, sehingga tidak dilakukan pengukuran pada IK 4 (Nilai PMPRB).

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja, sebagai unsur pengawasan intern lingkup KKP, Inspektorat I KKP melaksanakan “Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP”.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang telah ditetapkan di atas diwujudkan dengan melalui metode pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Audit Kinerja;
2. Reviu Laporan Keuangan (LK) Mitra Inspektorat I KKP;

3. Reviu LAKIP/Laporan Kinerja (LKj) Mitra Inspektorat I KKP;
4. Supervisi Pimpinan;
5. Pemantauan Tindak Lanjut;
6. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;
7. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;
8. Evaluasi unit Kerja berstatus WBK/WBBM;
9. Reviu Perencanaan Program/Kegiatan Mitra Inspektorat I KKP;
10. Reviu Penganggaran Mitra Inspektorat I KKP;
11. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja;
12. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi;
13. Pemantauan Program Strategis bidang KP;
14. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA

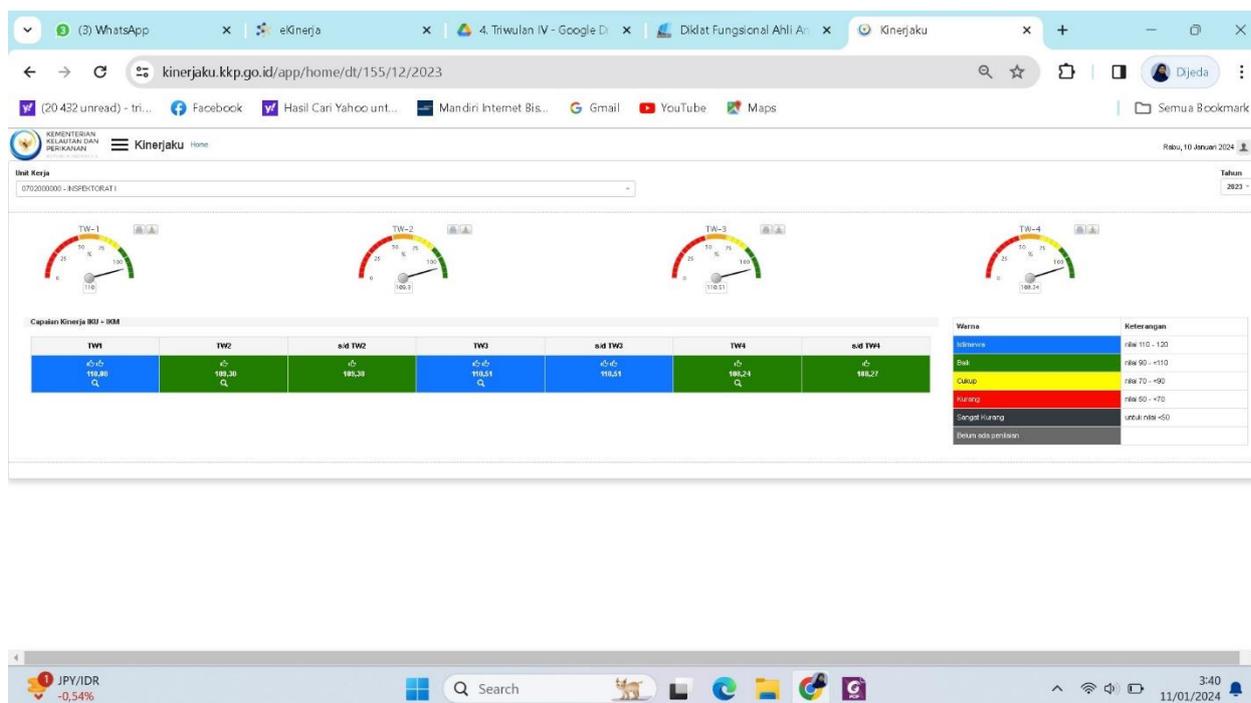
Pengelolaan data kinerja mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja tersebut berisi informasi sasaran kinerja beserta indikator dan target yang akan dicapai pada Tahun 2023. Pengukuran dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja Inspektorat I untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) secara periodik setiap triwulan, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) dengan tingkat toleransi 10% dan maksimal pencapaian 120%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Kode Warna	Rentang Nilai
1.	Baik	$\geq 100\%$
2.	Cukup	70 - $< 100\%$
3.	Kurang	$< 70\%$
4.	Belum ada penilaian	-
5.	Belum input capaian	-

B. CAPAIAN KINERJA LEVEL II

Capaian kinerja Level II Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat I dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis. Berdasarkan aplikasi pengelolaan kinerja, kondisi capaian kinerja IKU Inspektorat I dapat disampaikan sebagaimana Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Capaian Kinerja IKU Inspektorat I Tahun 2023

Capaian kinerja Inspektorat I selama Tahun 2023 adalah 110.00% untuk TW I, 109.30% untuk TW II, 110.51% untuk TW III, dan 108.24% untuk TW IV. Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat I termasuk dalam kategori baik (hijau).

Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja SS dihasilkan dari kinerja masing-masing indikator kinerja yang mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan SS tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian ketiga sasaran kinerja Inspektorat I berjumlah 13 Indikator Kinerja dari sebelumnya sebanyak 14 Indikator Kinerja. Hal tersebut dikarenakan pada Triwulan IV telah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja untuk perubahan Indikator Kinerja PMPRB. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, Tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa IKU PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen PK unit kerja. Hal ini dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Road Map Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General sehingga IKU PMPRB tidak perlu untuk dicantumkan kembali.

Dalam implementasinya, masing-masing indikator memiliki parameter dan waktu pengukuran yang berbeda. Capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2023 sebanyak 13

IKU. Adapun perkembangan capaian kinerja Inspektorat I selama Tahun 2023 disampaikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		TAHUN 2023			Ket.
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I	≤1%	0,0001%	120%	Capaian di atas target dengan nilai maksimal (120%)
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I	Level 3,1	Level 3,56	114,84%	Capaian di atas target
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	17 unit	18 unit	105,88%	Capaian di atas target
		4	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	33	-	-	Pada Triwulan IV 2023 terdapat Revisi PK sehingga tidak dilakukan pengukuran.
		5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I	80,50	83,18	103,33%	Capaian di atas target
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I	6	Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I	81%	87,69%	108,26%	Capaian di atas target
		7	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I	81%	91,50%	112,96%	Capaian di atas target
		8	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I	81%	91,27%	112,68%	Capaian di atas target
		9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I	75%	89,13%	118,84%	Capaian di atas target
		10	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4 Rekom	5	120%	Capaian di atas target dengan nilai maksimal (120%)
		11	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I	88%	96,43%	109,58%	Capaian di atas target
		12	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I	80%	99,09%	120%	Capaian di atas target dengan nilai maksimal (120%)
3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat I	13	Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	Target tercapai
		14	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	Target tercapai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja Inspektorat I pada tahun 2023 cukup memuaskan dimana dari 13 IKU yang diperjanjikan, sebanyak 11 IKU dapat tercapai melampaui target, dan 2 IKU tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id) ditetapkan 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal.

Secara lebih rinci, gambaran mengenai capaian kinerja dari Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I pada Tahun 2023 disampaikan sebagai berikut:

SS-1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat I

Sasaran Strategis ini ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan Inspektorat I secara terukur dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam setiap program/kegiatan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan fungsinya, Inspektorat I menjadikan Tata Kelola yang Baik di lingkungan Mitra Inspektorat I sebagai Sasaran Strategis pertama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sejalan dengan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menerangkan bahwa salah satu fungsi APIP adalah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya Inspektorat I dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di lingkungan Mitra Inspektorat I diukur dan dipertanggungjawabkan melalui capaian 5 Indikator Kinerja sebagaimana berikut.

IKU 1-“Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I”

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP

atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Mitra Inspektorat I tahun 2022. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi minimize (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan secara tahunan yaitu pada Triwulan III.

Tabel 5. Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal (BPK RI) pada Mitra Inspektorat I

IKU 1	Capaian					Target 2023	Realisasi 2023
	2018	2019	2020	2021	2022		
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I	0,35%	0,00%	0,07%	0,04%	0,005	≤1%	0,0001%

Sumber : Hasil Pengolahan atas Hasil Pengawasan BPK terhadap LK KKP 2022

Pengukuran IKU 1 dilakukan berdasarkan temuan materialitas atas temuan keuangan pada Setjen dan BPPSDMKP selama Tahun 2022 sebesar Rp105.051.599,00 dibandingkan dengan realisasi anggaran Setjen dan BPPSDMKP Tahun 2022 yang mencapai Rp1.774.539.422.872,00 atau 0,001%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target IKU 1 tercapai dengan nilai materialitas temuan kurang dari 1% atau mencapai target yang diharapkan sesuai dengan mekanisme polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Pada tahun 2023, persentase temuan materialitas pengawas eksternal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal satker telah optimal.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat I untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain Probit Audit, Audit Kinerja, Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Reviu Penganggaran, Reviu LK, Pengawasan Penyerapan Anggaran, Pengawasan Pengelolaan BMN, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLHP) BPK dan Pengawasan Tematik lainnya (Kegiatan Prioritas, PNBP, dll).

Dalam rencana jangka menengah 2020-2024, target IKU ini ditetapkan sebesar ≤1% setiap tahun (*stabilized*), begitu juga pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka kondisi capaian akan sama dengan kondisi tahun ini.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas Mitra Inspektorat I dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I	≤1%	0,07%	120	≤1%	0,04%	120	≤1%	0,005%	120	≤1%	0,0001%	120	≤1%	0,0001%	120

IKU 2 - “Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Level)”

Tingkat Maturitas SPI Mitra Inspektorat I adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Mitra Kerja Inspektorat I. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Target Level Maturitas SPI mitra Inspektorat I pada Tahun 2023 adalah Level 3 (nilai 3,1) dengan penilaian dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Eselon I Lingkup KKP dan dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Dalam prosesnya, pengukuran tingkat maturitas SPIP Mitra Inspektorat I mengacu kepada hasil penilaian BPKP. Namun bilamana BPKP tidak melakukan penilaian atau belum mengeluarkan hasil penilaian saat penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKj), maka tingkat maturitas ditentukan berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen KKP.

Namun hingga saat laporan ini disusun baru ada Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan dari BPKP dengan nilai 3,561.

Tingkat Maturitas Level 3 (terdefinisi) atas implementasi SPI menunjukkan bahwa mitra telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Tabel 7. Perkembangan Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Level)

IKU 2	Capaian					Target 2023	Realisasi 2023
	2018	2019	2020	2021	2022		
Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I	Level 3 (3,499)	Level 3 (3,567)	Level 4 (4,204)	Level 3 (3,6)	Level 3 (3,807)	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,56)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 2 ini adalah Reviu Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mitra Inspektorat I, konsultasi tentang SPIP, asistensi atau pendampingan dalam penyusunan manajemen risiko (MR), dan evaluasi manajemen risiko.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Level Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (level)	3	4	120	3	3	120	3	3	120	3	3	114,84	3	3	114,84

IKU 3 - "Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)"

Jumlah Unit Kerja Berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Mitra Inspektorat I adalah jumlah unit kerja yang telah memenuhi syarat memperoleh hasil penilaian indikator proses dan indikator hasil ≥ 75 poin berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat V) sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan target 17 unit kerja untuk tahun 2023 ini.

Tabel 9. Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)

IKU 3	2021		2022		Unit Kerja Berpredikat WBK s/d Tahun 2023
	T	R	T	R	
Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	12	11	13	15	SETJEN: 1. Pusdatin 2. Biro Umum dan PBJ BPPSDM: 1. SUPM Pontianak 2. BRPBAPPP Maros 3. BPPP Tegal 4. BBRBLPP Gondol 5. BPPP Banyuwangi 6. SUPM Waiheru 7. BROL Bali 8. BRPPUPP Palembang 9. BPPP Medan 10. BRPI Sukamandi 11. BBRSEKP 12. Politeknik AUP Jakarta

IKU 3	2021		2022		Unit Kerja Berpredikat WBK s/d Tahun 2023
	T	R	T	R	
					13. BPPA Sukamandi 14. Poltek KP Pangandaran 15. Poltek KP Sidoarjo 16. BPPP Ambon

Dengan bertambahnya unit kerja berpredikat menuju WBK sebanyak 3 unit kerja pada tahun 2023, yaitu (Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Ambon; Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran; serta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo), maka secara kumulatif jumlah unit kerja berpredikat WBK sampai dengan tahun 2023 sebanyak 18 unit kerja atau 105,88% dari target 17 unit kerja. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan capaian satker mitra Inspektorat I yang memperoleh predikat WBK, karena adanya komitmen satker terhadap pencapaian WBK serta adanya pendampingan maupun asistensi Pembangunan Zona Integritas dari tim Inspektorat Jenderal.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 3 ini antara lain Pendampingan dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM serta Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada satker lingkup Mitra Inspektorat I.

IKU 4 – “Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I”

Pada Triwulan IV telah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja untuk perubahan Indikator Kinerja PMPRB. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, Tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa IKU PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen PK unit kerja. Hal ini dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Road Map Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General sehingga IKU PMPRB tidak perlu untuk dicantumkan kembali.

IKU 5 - “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I”

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di mitra Inspektorat I pada periode evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kualitas lima komponen sistem akuntabilitas kinerja yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.

Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja Mitra Inspektorat I secara berkelanjutan, Inspektorat I menetapkan nilai SAKIP sebagai salah satu Indikator Kinerja yang diukur melalui hasil penilaian Kementerian PAN dan RB. Seiring kebutuhan untuk mempercepat proses pengelolaan data kinerja, pada tahun 2023, Inspektorat I menetapkan target nilai SAKIP Mitra Inspektorat I meraih predikat A dengan nilai 80 berdasarkan hasil penilaian mandiri.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen yang kemudian disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB melalui Surat Plt. Inspektur Jenderal KKP Nomor B.251/ITJ/HP.440/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja mitra Inspektorat I pada tahun 2023 memperoleh predikat penilaian “A” dengan nilai capaian 83,18 yang diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP pada unit kerja mitra Inspektorat I yaitu Setjen (81,54) dan BPPSDMKP (84,33).

Tabel 10. Perkembangan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I

IKU 4	Capaian					Target 2023	Realisasi 2023
	2018	2019	2020	2021	2022		
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I	A (84,82)	A (83,34)	A (87,32)	A (86,32)	A (80,63)	A (80,50)	A (83,18)

Berdasarkan tabel di atas, nilai Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat I sejak tahun 2018 telah memperoleh predikat penilaian “A”. Namun, target nilai capaian tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan target nilai capaian tahun 2021. Dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa telah terjadi perubahan pada target IK-5 dari sebelumnya 83,00 menjadi 80,01. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya penerapan pedoman baru evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB. Selain itu, perubahan tersebut sesuai dengan arahan dari Biro Perencanaan untuk dilakukan penyesuaian target yang disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 787/SJ.1/HP.440/IX/2022 tanggal 21 September 2022.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian IKU tersebut antara lain Reviu Laporan Kinerja, Evaluasi Implementasi SAKIP, Workshop Evaluasi atas Implementasi SAKIP bagi Tim Evaluator Implementasi SAKIP KKP dan mitra kerja, Asistensi penguatan SAKIP pada unit kerja pada unit kerja mitra Inspektorat I.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 85 (A) pada tahun 2024, maka capaian tahun 2023 telah mencapai 97,86%.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Mitra Inspektorat I Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I	81	87,32	107,8	83	86,32	104	80,01	80,63	100,77	80,50	83,18	103,33	85	83,18	97,86

SS-2: Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I

Pengawasan intern yang handal merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sebuah manajemen organisasi, pengawasan intern memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Beberapa fungsi utama pengawas intern dalam organisasi antara lain:

1. Mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan tujuan.
2. Mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*).
3. Melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran peraturan dan norma.
4. Mendorong implementasi kebijakan pemerintah/nasional sesuai dengan sasaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I, diperlukan suatu ukuran-ukuran yang dapat menggambarkan kualitas dari pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan kepada mitra kerja. Karena itu, Inspektorat I menetapkan "Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I" sebagai sasaran kinerja kedua sebagai ukuran kualitas pengawasan yang diukur melalui pencapaian tujuh Indikator Kinerja, yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I;
2. Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I;
3. Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I;
4. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I;

5. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi);
6. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan lingkup Inspektorat I;
7. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I.

Gambaran pencapaian sasaran “Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I” berdasarkan capaian masing-masing IKU disampaikan sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian IKU Sasaran Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I Tahun 2023

No. IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
IK-6	Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I	81%	87,69	108,26%
IK-7	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I	81%	91,50%	112,96%
IK-8	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I	81%	91,27%	112,68%
IK-9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I	75%	89,13%	118,84%
IK-10	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4 Rekom	5 rekom	120%
IK-11	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I	88%	96,43%	109,58%
IK-12	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I	80%	99,09%	120%

Terlihat dari data capaian di atas bahwa 7 (tujuh) IKU di SS 2 memiliki persentase capaian di atas 100% atau realisasinya di atas target yang telah ditetapkan, yang dapat menunjukkan kinerja Inspektorat I sangat baik.

IKU 6 - “Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I”

Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam pengawalan pelaksanaan kegiatan program prioritas/strategis mitra kerja. Kegiatan mitra/unit eselon I dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 1. memiliki dampak langsung kepada masyarakat; 2. memiliki anggaran besar; 3. mendukung

secara langsung pencapaian target kinerja KKP; 4. mendukung pencapaian prioritas nasional; 5. merupakan arahan direktif presiden; dan 6. pertimbangan lainnya yang relevan.

Penilaian terhadap IKU 6 pada tahun 2023 diukur dari tingkat efektivitas kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I lingkup Mitra Inspektorat I pada tahun 2022 (T-1) dengan target 81% kegiatan dikategorikan efektif. Pengukuran dilakukan melalui evaluasi yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP. Capaian Evaluasi Bantuan Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13. Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I

IKU 6	2022			2023		
	T	R	%	T	R	%
BPPSDM: Pelatihan Kepada Masyarakat	80%	89,27%	111,59	81%	87,69%	108,26

Penilaian terhadap IKU 6 pada tahun 2023 berdasarkan program prioritas yang ditetapkan pada masing-masing unit Eselon I yang memiliki fokus terhadap kegiatan prioritas/strategis berupa bantuan pemerintah bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Puslatluh BPPSDMKP).

Pada tahun 2021, terjadi perubahan mitra Inspektorat I, yang semula adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL, saat ini menjadi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut) menjadi BPPSDM, sedangkan pengukuran kegiatan prioritas khususnya efektivitas yang hanya dapat dilakukan terhadap kegiatan prioritas tahun sebelumnya, dalam hal ini kegiatan prioritas TA 2020 pada Ditjen PKRL yang digunakan sebagai capaian untuk tahun 2021. Oleh karena itu, untuk capaian tahun 2022, tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 6 ini antara lain Pemantauan Kinerja Penyuluh dan Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 mencapai 108,26% dari target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 81%.

Tabel 14. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I	80%	89,27%	111,59	81%	87,69%	108,26	80%	87,69%	109,61

IKU 7 - “Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I”

Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Mitra Inspektorat I merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam pengawalan pelaksanaan pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat.

Berkenaan dengan pencapaian Sasaran Strategis “Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I” melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I, Inspektorat I telah mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran IKU tersebut melalui 3 (tiga) indikator/variabel, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup KKP.

Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui bahwa tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat I yang merupakan nilai rata-rata dari Setjen (90%) dan BPPSDM (93%) pada tahun 2023 mencapai 91,50%. Dengan demikian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I Tahun 2023 mencapai 91,50% dari target 81%.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kualitas program pengawasan Tahunan Itjen dalam hal pengelolaan BMN pada mitra kerja,

pengawasan berjenjang melalui kendali mutu pengawasan, dan hasil (*outcome*) pengawasan yang ditunjukkan melalui tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I. Rincian tingkat efektivitas pengawasan atas pengelolaan BMN pada Unit Eselon I mitra Inspektorat I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I

IKU 6	Capaian				Target 2023	Realisasi 2023
	2019	2020	2021	2022		
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I	-	84,50%	82%	98%	81%	91,50%

Berdasarkan hasil pengukuran, dapat disampaikan bahwa capaian IKU untuk Inspektorat I sebesar 91,50%. Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disempurnakan untuk pencapaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, diantaranya:

1. Menetapkan kegiatan pendampingan (*consulting*) dan penjaminan mutu (*quality assurance*) atas pengelolaan BMN pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat I;
2. Mendorong capaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada mitra Inspektorat I; dan
3. Mendorong penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada mitra Inspektorat I.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat I untuk mendukung capaian IKU 7 tersebut yaitu Evaluasi Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN pada Setjen dan BPPSDM.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 mencapai 114,38% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80%.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I	70	84,5	120,71	72,5	82	113,10	80	98	120	81	91,50	112,96	80	91,50	114,38

IKU 8 - “Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I”

Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam pengawalan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP.

Metode pengukuran yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi meliputi *Desk Evaluation* atau penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, permintaan keterangan kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh, dan penilaian (*scoring*) berdasarkan lembar kerja yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil pengukuran, pada tahun 2021 tingkat efektivitas pengawasan PBJ lingkup mitra Inspektorat I mencapai 85,76% yang merupakan nilai rata-rata dari Setjen (84,29%) dan BPPSDM (87,22%), sedangkan untuk tahun 2022 tingkat efektivitas pengawasan PBJ lingkup mitra Inspektorat I mencapai 88,12% yang merupakan nilai rata-rata dari Setjen (88,54%) dan BBPSDM (87,69%) dan untuk tahun 2023 tingkat efektivitas pengawasan PBJ lingkup mitra Inspektorat I mencapai 91,27% yang merupakan nilai rata-rata dari Setjen (92,02%) dan BPPSDM (90,52%). Dengan demikian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I Tahun 2023 mencapai 112,68% atau di atas target yang ditetapkan. Terjadi peningkatan pencapaian sebesar 2,53% dari tahun 2022. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kualitas program pengawasan Tahunan Inspektorat I terhadap pelaksanaan PBJ pada mitra kerja, pengawasan berjenjang melalui kendali mutu pengawasan, dan hasil (*outcome*) pengawasan yang ditunjukkan melalui tingkat kepatuhan PBJ Mitra Inspektorat I. Rincian Tingkat Efektivitas Pengawasan atas Pelaksanaan PBJ pada Mitra Inspektorat I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17. Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I

IKU 7	Capaian				Target 2023	Realisasi 2023
	2019	2020	2021	2022		
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I	-	91,69%	85,76%	88,12%	81%	91,27%

Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disebabkan belum seluruh pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan penyelesaian PBJ tidak tepat waktu, namun terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2023.

Secara umum Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup KKP TA 2023 Mitra Inspektorat I telah memenuhi kriteria kualitas. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan untuk pencapaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Menyusun KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak untuk paket Pengadaan Barang/Jasa dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian sebelum bulan Juni tahun berjalan;
2. Melaksanakan seluruh pemilihan penyedia paket pengadaan barang/jasa melalui SPSE;
3. Melakukan proses seleksi/tender PBJ selambat-lambatnya pada Semester I tahun berjalan; dan
4. Pengendalian terhadap pelaksanaan PBJ yang masih dalam proses pelaksanaan agar selesai tepat waktu dengan volume dan spesifikasi sesuai kontrak;
5. Penetapan kegiatan pendampingan (*consulting*) pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat I KKP;
6. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan PBJ pada mitra Inspektorat I;
7. Peningkatan kepatuhan pelaksanaan PBJ pada mitra Inspektorat I sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dilakukan Inspektorat I untuk mendukung capaian IKU 7 tersebut yaitu Evaluasi Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Setjen dan BPPSDM.

Dikarenakan target tahun 2023 sama dengan target jangka menengah, maka persentase capaian tahun 2023 dibandingkan target jangka menengah sama dengan persentase capaian tahun 2022 yaitu sebesar 110,15%.

Tabel 18. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I dari Tahun 2020 dan dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I	70	91,69	130,99	72,5	85,76	118,29	80	88,12	110,15	81	91,27	112,68	80	91,27	114,09

IKU 9 - "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Mitra Inspektorat I"

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang sudah tuntas ditindaklanjuti oleh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan dengan target 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada mitra berdasarkan LHP yang terbit pada TW IV Tahun 2022 s.d. TW III Tahun 2023.

Tabel 19. Perkembangan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Mitra Inspektorat I

IKU 8	Capaian					Target 2023	Realisasi 2023
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Mitra Inspektorat I	76,62%	89,11%	86,82%	90,72%	87,03%	75%	89,13%

Hasil pengukuran capaian IKU 8 s.d. Triwulan IV Tahun 2023 disampaikan bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh mitra kerja Inspektorat I sebesar 89,13% dari target 75% atau pencapaiannya terhadap target sebesar 118,84%.

Dari total 506 rekomendasi LHP Inspektorat I pada Setjen dan BPPSDMKP, sebanyak 451 rekomendasi telah tuntas ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja mitra kerja Inspektorat I, dengan rincian Setjen telah menindaklanjuti 112 rekomendasi dari 113 rekomendasi atau 99,12% dan BPPSDMKP telah menindaklanjuti 339 rekomendasi dari 393 rekomendasi atau 86,26%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 mencapai 111,41% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80%.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Mitra Inspektorat I dari Tahun 2020 dan dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	R	R	R	%	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Mitra Inspektorat I	60	86,82	144,7	65	90,72	139,56	70	87,03	124,33	75	89,13	118,84	80	89,13	111,41

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, angka capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat I menunjukkan trend positif. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas atau upaya yang dilakukan oleh Inspektorat I, namun komitmen dan keseriusan dari Mitra Inspektorat I untuk segera menyelesaikan saran yang diberikan oleh Inspektorat I sangat menentukan capaian kinerja IKU ini. Untuk itu diperlukan pengawasan secara berkelanjutan Inspektorat I untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern oleh Mitra Inspektorat I. Hal ini penting untuk dilakukan karena capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat I merupakan akumulasi dari kinerja penyelesaian tindak lanjut pada Setjen dan BPPSDM.

IKU 10 - “Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I”

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap kebijakan strategis mitra kerja Inspektorat I untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi dengan target 4 (empat) rekomendasi pada tahun 2023.

Adanya rekomendasi kebijakan ini sejalan dengan peran Itjen sebagai konsultan (*Advisory Services*) yang akan memberikan jasa konsultasi serta saran perbaikan dalam proses pelaksanaan program/kegiatan juga pada tataran kebijakan.

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IKU 9 tersebut s.d. Triwulan IV Tahun 2023 tercapai 5 (lima) rekomendasi kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I atau mencapai target dengan capaian 125% sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 21. Perkembangan Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)

IKU 9	Capaian					Target 2023	Realisasi 2023
	2018	2019	2020	2021	2022		
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	5	4	5	4	4	5

Adapun 5 (lima) rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat I selama tahun 2023 yaitu: 1) Kajian Teknis Peraturan Menteri KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KKP, 2) Rekomendasi Kebijakan atas Pengelolaan Rumah Negara lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3) Rekomendasi Kebijakan atas Pengelolaan Kendaraan Operasional Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 4) Surat Edaran tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran untuk Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 5) Rekomendasi Kebijakan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP.

Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa target IKU ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*). Perbandingan capaian dari tahun 2020 dan dengan target jangka menengah disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Perkembangan Capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I	4	4	100	4	5	125	4	4	100	4	5	125	4	5	125

IKU 11 - "Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I"

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan adalah jumlah penugasan dan pelaporan hasil pengawasan (audit, dan evaluasi) yang memenuhi standar mutu pengawasan yang diukur dari tingkat kepatuhan penyampaian formulir Kendali Mutu Pengawasan (KMP) pada Inspektorat I dengan target minimal 88% pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi capaian IKU ini sebesar 96,43% dari target 88% atau tercapai sebesar 109,58%. Hasil tersebut berdasarkan Hasil Evaluasi Kendali Mutu Pengawasan lingkup Itjen KKP yang dilaksanakan oleh Inspektorat V, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Perkembangan pelaksanaan penugasan dan pelaporan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Inspektorat I dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Perkembangan Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I

IKU 11	Capaian				Target 2023	Realisasi 2023
	2019	2020	2021	2022		
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I	85,23%	100%	97,09%	100%	88%	96,43%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui capaian IKU 11 telah mencapai target. Pada tahun 2023 terdapat kenaikan capaian pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu yang ada sehingga berdampak pada meningkatnya capaian IKU 11 ini. Terjadi penurunan capaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, maka Inspektorat I akan terus melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu pengawasan, diantaranya melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur pengawasan Inspektorat I dalam mengimplementasikan pengendalian secara berjenjang. Lebih lanjut, Inspektorat I juga akan terus melakukan evaluasi atas implementasi Kendali Mutu Pengawasan secara periodik di bawah koordinasi Inspektorat V untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap sesuai dengan standar mutu pengawasan.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 mencapai 108,35% dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 89%.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Persentase KMP lingkup Inspektorat I dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	T	R	%	%	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I	85	100	117,65	86	97,09	112,90	87	100,00	114,94	87	96,43	114,94	89	96,43	108,35

IKU 12 - "Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I"

Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT adalah persentase kesesuaian pelaksanaan penugasan pengawasan lingkup Inspektorat I dengan PKPT pada periode pengukuran dengan target 80% penugasan pengawasan sesuai dengan PKPT Inspektorat I Tahun 2023.

Hasil pengukuran selama tahun 2023, tingkat kepatuhan PKPT lingkup Inspektorat I sebesar 99,09% dari target 80% atau capaian terhadap target sebesar 123,86%. Hasil tersebut berdasarkan Hasil Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Itjen KKP yang dilaksanakan oleh Inspektorat V, dengan rincian:

Tabel 25. Rincian Capaian Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan PKPT pada Inspektorat I Tahun 2023

Uraian	Semester I	Semester II	Capaian Tahun 2023
Total auditi/evaluasi	33	55	88
Penugasan dilaksanakan sesuai dengan PKPT	33	54	87
Nilai kepatuhan penugasan terhadap PKPT (%)	100,00	98,18	99,09

Perkembangan pelaksanaan kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Perkembangan Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I

IKU 11	Capaian					Target 2023	Realisasi 2023
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I	57,78%	88,54%	94,06%	83,74%	95,20%	80%	99,09%

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan tahunan capaian IKU 12 ini terjadi peningkatan capaian pada tahun 2023 dibandingkan capaian tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan penyusunan PKPT sudah mempertimbangkan unit kerja, lokasi yang akan dilakukan pengawasan, personil tim dari inspektorat lain dan waktu pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan dapat sesuai dengan PKPT.

Capaian IKU ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti kebutuhan penyesuaian fokus pengawasan, isu strategis, dan perubahan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah monitoring perencanaan penugasan dan evaluasi pelaksanaan PKPT. Target IKU ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (stabilized) sehingga bila dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2024) kondisinya akan sama dengan capaian tahun 2023.

Tabel 27. Perbandingan Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	R	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I	80	94,06	117,58	80	83,74	104,68	80	95,20	119,00	80	99,09	119,00	80	99,09	123,86

SS-3: Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat I

Pencapaian SS-3 diukur dengan 2 (dua) IKU, yaitu IKU 13 “Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I” dan IKU 14 “Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I” dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2023

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
IK 13	Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I	Maximize	100%	100%	100%
IK 14	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I	Maximize	100%	100%	100%

IKU 13 - “Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I”

Capaian IKU 13 ini dihitung berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap penganggaran, tingkat kepatuhan terhadap pengukuran kinerja dan tingkat kepatuhan terhadap penyusunan Laporan Kinerja Interim, dan pengukurannya dilakukan secara triwulan. Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran adalah kepatuhan unit kerja Inspektorat I dalam menyampaikan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) bulanan kepada Sekretariat Itjen. Tingkat kepatuhan terhadap pengukuran kinerja diukur dari kepatuhan pengukuran kinerja menggunakan aplikasi dan ketersediaan Laporan Kinerja Interim setiap triwulan.

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU 13

IKU 13	2019		2020		2021		2022		2023		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengukuran Kinerja lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, Inspektorat I telah memenuhi seluruh kriteria kepatuhan dalam penganggaran dan pengukuran kinerja dengan capaian sebesar 100% dari target. Capaian IKU 13 ini dari tahun ke tahun selalu tercapai sebanyak 100% yang menunjukkan bahwa penyusunan dan penyampaian ROK bulanan, pengisian aplikasi triwulan ke (n) dan Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan ke (n) semuanya sebesar 100%.

IKU 14 - "Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I"

Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I adalah pengelolaan anggaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat.

Terselenggaranya pengelolaan anggaran di lingkungan Inspektorat secara tertib dan akuntabel ditunjukkan dengan tersedianya Rencana Kegiatan dan Anggaran Bulanan serta Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran secara tepat waktu. Pada tahun 2023, pemenuhan kedua bukti pengelolaan anggaran tersebut ditargetkan 100% tersedia secara tepat.

Berdasarkan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, Inspektorat I telah memenuhi seluruh kriteria terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel dengan capaian sebesar 100% dari target. Capaian IKU 14 ini tercapai sebanyak 100%.

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Per Kegiatan

Pada tahun 2023, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I didukung oleh anggaran sebesar Rp4.641.604.000,00 yang telah mengalami revisi menjadi Rp4.817.252.000,00. Dalam operasionalnya, anggaran tersebut dialokasikan

untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I dan Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I. Realisasi anggaran Inspektorat I s.d. 31 Desember Tahun 2023 mencapai Rp4.816.843.900,00 atau 99,99% dari pagu anggaran. Secara lebih rinci realisasi anggaran Inspektorat I Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Realisasi Anggaran Inspektorat I s.d. Triwulan IV Tahun 2023 (setelah revisi)

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I						
Pengawasan Akuntabilitas Keuangan	1.608.989.000	1.577.647.000	1.577.645.100	99,99	1.900	0,000001
Pengawasan Akuntabilitas Non Keuangan	619.318.000	676.802.000	676.405.000	99,99	397.000	0,00059
Dukungan Operasional Pengawasan	1.113.297.000	1.173.825.000	1.173.816.200	99,96	8.800	0,0000075
Pencadangan AA	739.543.000 (di revisi)	-	-	-	-	-
Pengawasan Kegiatan Prioritas/ Strategis Mitra Inspektorat I						
Persiapan Pelaksanaan Pengawasan	30.400.000	4.465.000	4.465.000	100,00	0	0,00
Pelaksanaan Pengawasan	1.269.600.000	1.384.513.000	1.384.512.600	99,99	400	0,00000029
Pencadangan AA	915.200.000 (di revisi)	-	-	-	-	-
Total	6.296.347.000	4.817.252.000	4.816.843.900	99,99	408.100	0,000085

Sisa anggaran TA 2023 sebesar Rp408.100,00 atau 0,000085% dari pagu. Sisa anggaran tersebut merupakan kumpulan sisa-sisa anggaran dari akun-akun terpisah.

Bila dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran sebelumnya, capaian realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 sisa anggaran sebesar Rp266.900 dari pagu anggaran sebesar Rp4.272.616.000 atau 0,0063% sedangkan pada tahun 2023 sisa anggaran sebesar Rp408.100 dari pagu anggaran sebesar Rp4.816.843.900 atau 0,000085%. Perbandingan jumlah dan realisasi anggaran Itjen KKP Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 31. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat I TA 2018-2023

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Nilai (Rp)	%
2018	5.283.729.000,00	5.279.451.700,00	99,92
2019	4.661.028.000,00	4.655.263.135,00	99,88
2020	3.290.346.000,00	3.285.399.095,00	99,85
2021	3.389.472.000,00	3.388.602.705,00	99,97
2022	4.272.616.000,00	4.272.349.100,00	99,99
2023	4.817.252.000,00	4.816.843.900,00	99,99

Berdasarkan tabel tersebut, capaian realisasi anggaran Inspektorat I dari tahun ke tahun sangat baik dengan realisasi anggaran 99,99% dan capaian output secara keseluruhan mencapai 100%.

2. Realisasi anggaran per Sasaran Kinerja

Pada Tahun 2023 Inspektorat I memiliki 3 (tiga) Sasaran Kinerja dengan Sasaran Kinerja 1 memiliki 4 (empat) IKU, Sasaran Kinerja 2 memiliki 7 (tujuh) IKU, Sasaran Kinerja 3 memiliki 2 (dua) IKU dengan total terdapat 13 (tiga belas) IKU dari 3 (tiga) Sasaran Kinerja, dengan rincian Sasaran Kinerja sebagai berikut:

Tabel 32. Sasaran Kinerja dan Realisasi Anggaran Inspektorat I TA 2023

No	Kegiatan/Sasaran Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	4.817.252.000,00	4.816.843.900,00	99,99
SK.1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat I			
SK.2	Pengawasan Intern Yang Handal pada Mitra Inspektorat I			
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat I			

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa anggaran sebesar Rp. 4.817.252.000,00 untuk mendukung tercapainya 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 13 IKU dengan capaian kinerja IKU adalah 108,24, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran sebesar Rp. 4.816.843.900,00 atau sebesar 99,99% dari target yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan anggaran yang ada mendukung untuk tercapainya target sasaran kinerja dan IKU yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Inspektorat I dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dinilai efisien karena dengan

input anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang sesuai dan melebihi target (100%).

3. Analisis Kualitas Penggunaan Anggaran (Efisiensi)

Sisa anggaran TA 2023 sebesar Rp408.100,00 atau 0,000085% dari pagu. Sisa anggaran tersebut merupakan kumpulan sisa-sisa anggaran dari akun-akun yang terpisah.

Bila dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran sebelumnya, capaian realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 sisa anggaran sebesar Rp266.900 dari pagu anggaran sebesar Rp4.272.616.000 atau 0,0063% sedangkan pada tahun 2023 sisa anggaran sebesar Rp408.100 dari pagu anggaran sebesar Rp4.816.843.900 atau 0,000085%. Perbandingan jumlah dan realisasi anggaran Itjen KKP Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat I TA 2018-2023

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Nilai (Rp)	%
2018	5.283.729.000,00	5.279.451.700,00	99,92
2019	4.661.028.000,00	4.655.263.135,00	99,88
2020	3.290.346.000,00	3.285.399.095,00	99,85
2021	3.389.472.000,00	3.388.602.705,00	99,97
2022	4.272.616.000,00	4.272.349.100,00	99,99
2023	4.817.252.000,00	4.816.843.900,00	99,99

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi anggaran Inspektorat I dari tahun ke tahun sangat baik dengan realisasi anggaran 99,99% dan capaian output secara keseluruhan mencapai 100%.

4. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja sebuah organisasi sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja *value for money* dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam *value for money*

berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Konsep pokok *value for money* antara lain:

1. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
3. Efisiensi: pencapaian output yang optimal dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Dalam hal ini, efisiensi merupakan perbandingan realisasi output dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada konsep dan kriteria di atas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat I telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ekonomis

Pengelolaan anggaran Inspektorat I telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja Inspektorat I yang dirumuskan untuk menjawab kebutuhan KKP, mitra kerja, dan internal Itjen. Dalam prosesnya, penyusunan anggaran Inspektorat I juga telah melalui proses review yang dilaksanakan oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan, Inspektorat I menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Inspektorat I diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM kualitas terbaik dengan biaya sekecil mungkin.

2. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2023, diketahui bahwa dari 13 IKU yang ditetapkan, sebanyak 11 IKU dapat tercapai melampaui target, dan 2 IKU tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan capaian IKU tersebut, nilai rata-rata pencapaian sasaran dan target kinerja Inspektorat I tahun 2023 yang ditunjukkan dengan capaian sampai dengan TW IV 2023 mencapai 108,24% atau di atas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran program pengawasan intern KKP terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan beserta tim pengelola kinerja Inspektorat I.

3. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengawasan Inspektorat I tahun 2023 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Inspektorat I dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dinilai efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang sesuai dan melebihi target (100%). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

a. Efisiensi Capaian Kinerja *Output*

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,99% sedangkan capaian *output* dari masing-masing kegiatan mencapai 100% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,000085% dalam menghasilkan *output* dengan optimal.

b. Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Bila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi tahun 2023, diketahui bahwa sumber daya anggaran Inspektorat I digunakan secara efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat

menghasilkan kinerja yang melebihi target (108,24%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan sebesar 8,24%.

Tabel 34. Efisiensi Anggaran Itjen KKP Tahun 2023 Per Jenis Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran (<i>Input</i>)	Realisasi Hasil		Efisiensi
99,99%	<i>Output</i>	100%	0,000085%
Dari alokasi anggaran Rp4.816.843.900,00	Kinerja Organisasi (NPSS)	108,24%	8,24%

Pencapaian efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali perjalanan dinas. Selain itu, tercapainya efisiensi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis risiko yang memungkinkan pengawasan Itjen lebih tepat sasaran.

D. REALISASI RENCANA AKSI

Pencapaian sasaran kinerja dilaksanakan berdasarkan rencana aksi pencapaian target kinerja Inspektorat I Tahun 2023. Rencana aksi disusun dengan menyajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya untuk mengupayakan mencapai sasaran kinerja yang diharapkan dalam rencana kegiatan yang menjadi sebuah pencapaian IKU dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pendukung pencapaian IKU Tahun 2023 berjumlah sekitar 38 jenis kegiatan dengan secara keseluruhan sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Inspektorat I selama Tahun 2023 antara lain:

1. Berdasarkan aplikasi pengelolaan kinerja KKP, Capaian Kinerja IKU Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV mencapai 108,24%. Angka tersebut berasal dari capaian tiga Sasaran Strategis, yaitu SS-1 "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat I", SS-2 "Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I", dan SS-3 "Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat I". Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja SS dihasilkan dari kinerja masing-masing indikator kinerja yang mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan SS tersebut;
2. Dari 13 KU yang digunakan untuk mengukur 3 SS Inspektorat I, seluruh Indikator mencapai target atau di atas target;
3. Capaian realisasi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Inspektorat I mencapai Rp4.816.843.900,00 atau 99,99% dari pagu anggaran.

B. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat I selama Tahun 2023, antara lain:

1. Adanya pemotongan anggaran kegiatan/realokasi dalam pencadangan AA sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang ada.
2. Perubahan sistem kerja menjadi tim kerja yang diadopsi berdampak kepada penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.

C. SARAN

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target IKU Inspektorat I dimasa datang, terdapat beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti, antara lain :

1. Melakukan penyesuaian rencana aksi pencapaian IKU serta menyusun skala prioritas dalam penentuan kegiatan dan anggaran yang difokuskan untuk mendukung pencapaian target IKU;

2. Melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian kinerja TA 2023 pada setiap IKU yang ada dan melakukan revisi atas target di masa datang dengan mempertimbangkan target jangka menengah dan kebijakan penganggaran serta arahan/kebijakan pimpinan KKP;
3. Melaksanakan pemantauan secara periodik per bulan atau sesuai kebutuhan untuk mengawal pencapaian IKU dengan memantau penyelesaian kegiatan yang mendukung pencapaian target Inspektorat Jenderal KKP serta meningkatkan koordinasi dengan mitra Itjen KKP dan pihak eksternal KKP dalam membantu pencapaian target kinerja dan percepatan capaian kinerja tahunan maupun jangka menengah.
4. Meningkatkan pengendalian internal atas kegiatan Inspektorat I dalam rangka pencapaian IKU terutama dalam kepatuhan PKPT, Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

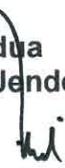
Nama : Teuku Nilwan
Jabatan : Inspektur I
Selanjutnya disebut pihak pertama

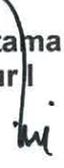
Nama : Teuku Nilwan
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Inspektur Jenderal

Teuku Nilwan

Pihak Pertama
Inspektur I

Teuku Nilwan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK. 1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 1
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	3,1
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (Jumlah Akumulasi)	17 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I (Nilai)	33
		5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	80,5 (A)
SK. 2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I	6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	81
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I	81
		8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I	81
		9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	75
		10	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
		11	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I (%)	88
		12	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I (%)	80
SK. 3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat I	13	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100
		14	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I (%)	100



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16

JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336

LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teuku Nilwan

Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tornanda Syaifullah

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

**Pihak Kedua
Inspektur Jenderal**


Tornanda Syaifullah

**Pihak Pertama
Inspektur I**


Teuku Nilwan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK. 1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 1
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	3,1
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (Jumlah Akumulasi)	17 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	80,5 (A)
SK. 2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	81
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I	81
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I	81
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	75
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I (%)	88
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I (%)	80
SK. 3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I (%)	100

DATA ANGGARAN

No	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	4.817.252.000
SK.1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP Mitra Inspektorat I	
SK.2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I	
Total Anggaran Inspektorat I Tahun 2023		4.817.252.000

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal


Tornanda Syaifullah

Pihak Pertama
Inspektur I


Teuku Nilwan

DATA ANGGARAN

No	KEGIATAN/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	4.641.604.000
SK.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat I	
SK.2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I	
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat I	
Total Anggaran Inspektorat I Tahun 2023		4.641.604.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Inspektur Jenderal



Teuku Nilwan

Pihak Pertama
Inspektur I



Teuku Nilwan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 137/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : 1. Inspektur Jenderal
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja
Lampiran : Satu Lembar
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan kualitas pelaksanaan pengawasan Itjen pada tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan.
 - a. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Itjen dengan target minimal 88% dari jumlah kegiatan pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh seluruh Inspektorat lingkup Itjen.
 - b. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diketahui bahwa Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan lingkup Itjen Tahun 2023 mencapai 95,99% atau 109,08% target 88%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Inspektorat disampaikan sebagai berikut:

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	95,95	96,91	96,43
2	Inspektorat II	97,87	94,06	95,97
3	Inspektorat III	87,82	98,18	93,00
4	Inspektorat IV	95,91	94,12	95,02
5	Inspektorat V	99,13	100,00	99,57
	Rata-rata	95,33	96,65	95,99

2. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

- a. Jumlah pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan yang ditetapkan pada Tahun 2023 dengan target kesesuaian sebesar 80%.
- b. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diketahui bahwa Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan lingkup Itjen Tahun 2023 mencapai 97,25% atau 121,56% dari target 80%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Inspektorat disampaikan sebagai berikut:

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	100	98,18	99,09
2	Inspektorat II	97,5	98,94	98,22
3	Inspektorat III	96,72	98,08	97,40
4	Inspektorat IV	100	98,26	99,13
5	Inspektorat V	90,79	97,14	93,97
	Rata-rata	96,32	98,17	97,25

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 140/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2023
Lampiran : -
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2023 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat lingkup Itjen, bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja (IK) Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2023 sebagaimana berikut:

1. Indikator Kinerja Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada lingkup Inspektorat Tahun 2023 yang telah ditetapkan, target IKM Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat adalah sebesar 100% yang diukur secara triwulan dengan target 100%.
2. Pengukuran IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel berdasarkan terselenggaranya pengelolaan anggaran secara tertib dan akuntabel atas pemenuhan Rencana Kegiatan dan Anggaran bulanan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran secara tepat waktu dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran (A)
Rencana Kegiatan dan Anggaran bulanan yang disampaikan kepada Bagian Keuangan selambatnya pada minggu pertama bulan berjalan (bobot 100%).
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran (B)
Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran bulanan yang disusun oleh BPP masing-masing unit kerja selambatnya pada minggu ke tiga bulan selanjutnya setelah pelaksanaan anggaran (bobot 100%)

- c. Pengukuran IKM Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat adalah rata-rata realisasi A dan B.

$$\frac{A + B}{2}$$

3. Berdasarkan hasil pemantauan, IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel Januari s.d Desember Tahun 2023 dari masing-masing Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Tingkat Pemenuhan (%)				
		Insp I	Insp II	Insp III	Insp IV	Insp V
A.	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bulanan	100	100	100	100	100
B.	Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran	100	100	100	100	100
Capaian Terkelola Anggaran (%)		100	100	100	100	100

4. Berdasarkan hasil pemantauan pada butir 3, maka perhitungan IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel dengan hasil sebagai berikut:

$$\frac{100 + 100}{2} = 100$$

5. Sesuai hasil perhitungan pada butir 4, maka realisasi IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2023 adalah 100% dari target 100%, sehingga capaian IK ini sebesar 100%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
Inspektur Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 139/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Tahun 2023
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2023 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Inspektorat lingkup Itjen, bersama ini disampaikan capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja pada masing-masing Inspektorat lingkup Itjen Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat lingkup Itjen KKP merupakan tingkat kepatuhan terhadap kinerja di lingkungan Inspektorat yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja pada masing-masing Inspektorat lingkup Itjen diukur secara triwulan dengan target 100%.
2. Pengukuran IK Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan formula perhitungan sebagai berikut:
 - a. Ketertiban atas pemenuhan kesesuaian format dan waktu pelaporan pada tiga komponen berikut:
 - 1) Pengisian aplikasi e-monev Bappenas dengan bobot 100% (A).
 - 2) Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP dengan bobot 100% (B).
 - 3) Penyampaian Data Laporan Kinerja dengan bobot 100% (C).
 - 4) Penyampaian Data Capaian Kinerja Tahunan kepada Sekretaris Itjen dengan bobot 100% (D).
 - 5) Penyampaian Data Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Tahunan) dengan bobot 100% (E)

- b. Pengukuran IKM Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat adalah rata-rata realisasi komponen A, B, C, D, E dengan formulasi :

$$\frac{A + B + C + D + E}{5}$$

3. Berdasarkan hasil pemantauan, capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Tahun 2023 dari masing-masing Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	Tingkat Pemenuhan (%)				
		Insp I	Insp II	Insp III	Insp IV	Insp V
A.	Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	100	100	100	100	100
B.	Pengisian Data Capaian Kinerja pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP	100	100	100	100	100
C.	Penyampaian Data Laporan Kinerja Interim	100	100	100	100	100
D.	Penyampaian Data Capaian Kinerja Tahunan kepada Sekretaris Itjen	100	100	100	100	100
E.	Penyampaian Data Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	100	100	100	100	100
Capaian Tingkat Kepatuhan (%)		100	100	100	100	100

4. Berdasarkan hasil pemantauan pada butir 3, maka perhitungan IK Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Tahun 2023 di masing-masing Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan hasil sebagai berikut :

$$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} = 100$$

5. Berdasarkan hasil pemantauan pada butir 3, dapat disampaikan realisasi IKM Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 100%, sehingga capaian IK ini sebesar 100%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan :
Inspektur Jenderal



☰ ✕

Inspektorat Jenderal 


K4




Pelaporan Komponen

🏠 > Pelaporan > Komponen

Informasi

Tahun : 2022

K/L : **[032]** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UK Eselon I : **[02]** - Inspektorat Jenderal

Unit Kerja

#	Kode & Nomenkelatur	Anggaran			% Progres Pelaksanaan (Kumulatif)	Kelengkapan												
		Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
+	032.02.05 Inspektorat V	25,842,594,000	25,836,696,322	100.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00a651; color: white; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">100.0%</div>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
+	032.02.06 Sekretariat Itjen	47,958,890,000	47,787,239,815	99.6	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00a651; color: white; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">100.0%</div>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

E-MONEV PP 39 - 2022 © by Direktorat SPPEPP - Kementerian PPN/Bappenas

Inspektorat Jenderal

K4

Beranda

Pemantauan

Komponen

RO Satker

Rincian Output

Indikator

Unduh Excel

Evaluasi PN

Major Project

Pelaporan RO Satuan Kerja

Home > Pelaporan > Rincian Output Satker

Informasi

Tahun : 2022
 K/L : [032] - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UK Eselon I : [02] - Inspektorat Jenderal

Unit Kerja

#	Kode & Nomenkelatur	Anggaran			% Progres Pelaksanaan (Kumulatif)	Kelengkapan											
		Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
+	032.02.05 ⁺ Inspektorat V	25,842,594,000	25,836,696,322	100.0	<div style="width: 100%;">100.0%</div>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
+	032.02.06 ⁺ Sekretariat Itjen	47,958,890,000	47,787,239,815	99.6	<div style="width: 100%;">100.0%</div>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

E-MONEV PP 39 - 2022 © by Direktorat SPPEPP - Kementerian PPN/Bappenas

Lampiran 2. Pengisian Data Capaian Kinerja Inspektorat I – V Tahun 2023 pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA


[Home](#)

Jumat, 12 Januari 2024 

Daftar Capaian Unit Kerja
 Tahun:
 Level-1:
 Level-2:
 Level-3:

	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
0700000000 - INSPEKTORAT JENDERAL (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)	113.17%   	109.86%   	114.79%   	111.43%   
0701000000 - SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL (INSPEKTORAT JENDERAL)	106.16%   	107.47%   	111.35%   	110.42%   
0702000000 - INSPEKTORAT I (INSPEKTORAT JENDERAL)	110.00%   	109.30%   	110.51%   	108.24%   
0703000000 - INSPEKTORAT II (INSPEKTORAT JENDERAL)	103.52%   	109.12%   	110.01%   	107.29%   
0704000000 - INSPEKTORAT III (INSPEKTORAT JENDERAL)	106.94%   	107.92%   	110.45%   	107.49%   
0705000000 - INSPEKTORAT IV (INSPEKTORAT JENDERAL)	110.00%   	109.30%   	110.35%   	109.66%   
0706000000 - INSPEKTORAT V (INSPEKTORAT JENDERAL)	104.17%   	103.26%   	104.96%   	106.55%   

Lampiran 3. Penyampaian Data Capaian Laporan Kinerja

No	Unit Kerja	Target	Realisasi
Triwulan I (LKj Interim)			
1.	Inspektorat I	7 April 2023	6 April 2023 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.605/ITJ.0/TU.330/IV/2023, tanggal 4 April 2023)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		
Triwulan II (LKj Interim)			
1.	Inspektorat I	7 Juli 2023	5 Juli 2023 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.987/ITJ.0/TU.330/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		
Triwulan III (LKj Interim)			
1.	Inspektorat I	7 Oktober 2023	6 Oktober 2023 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.1464/ITJ.0/TU.330/X/2023, tanggal 4 Oktober 2023)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		
Triwulan IV (LKj Tahunan)			
1.	Inspektorat I	7 Januari 2024	5 Januari 2024 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.7/ITJ.0/TU.330/I/2024, tanggal 3 Januari 2024)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 138/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : 1. Inspektur Jenderal
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2023
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup KKP sampai dengan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK adalah unit kerja yang diusulkan/ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) atau Tim Penilaian Nasional (TPN) dengan mengacu pada PERMEN PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KKP.
2. Pencapaian jumlah unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2023 dihitung berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berpredikat Menuju WBK lingkup KKP secara kumulatif sebelum tahun 2023 dan ditambahkan dengan unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK pada tahun 2023 berdasarkan penilaian TPI dan/atau TPN.
3. Capaian kinerja dihitung berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berstatus WBK lingkup KKP secara kumulatif sebelum tahun 2023 dan tambahan capaian pada tahun 2023 berdasarkan penilaian TPI dan/atau TPN.

4. Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk unit kerja lingkup KKP yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas menuju WBK sebanyak 90 unit kerja yang dihitung secara kumulatif dari capaian tahun-tahun sebelumnya di mana hingga tahun 2022 jumlah unit kerja lingkup KKP yang telah berpredikat Menuju WBK sebanyak 83 unit kerja.
5. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 14 unit kerja yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas Menuju WBK berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir. Dengan demikian, secara kumulatif hingga tahun 2023 jumlah unit kerja lingkup KKP berpredikat Menuju WBK sebanyak 97 unit kerja dengan rincian masing-masing Unit Eselon I dan Mitra Inspektorat sebagai berikut.

Unit Eselon I	TPI	TPN	Jumlah	Capaian s/d 2023 per Mitra Inspektorat
Setjen	3	0	3	18
BPPSDMKP	14	1	15	
DJPT	13	2	15	29
DJPSPDKP	14	0	14	
DJPB	11	2	13	21
DJPKRL	6	2	8	
DJPDSPKP	5	0	5	29
BPPMHKP	18	6	24	
Total	84	13	97	97

6. Secara lebih rinci, daftar unit kerja lingkup KKP yang telah mendapatkan predikat sebagai Zona Integritas Menuju WBK disampaikan pada Lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Lampiran Memorandum

Nomor : 138/ITJ.0/TU.140/I/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

Lampiran 1. Daftar Unit Kerja Bepredikat Zona Integritas Menuju WBK Lingkup KKP Sampai Dengan Tahun 2023

A. Sekretariat Jenderal

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	SETJEN	2022
2	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	SETJEN	2020
3	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	SETJEN	2019

B. BPPSDMKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	SUPM Pontianak	BPPSDMKP	2017
2	SUPM Waiheru	BPPSDMKP	2018
3	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2017
4	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP	BPPSDMKP	2022
5	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan	BPPSDMKP	2021
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	BPPSDMKP	2017
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	BPPSDMKP	2022
8	Balai Riset Pemuliaan Ikan	BPPSDMKP	2021
9	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2017
10	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2019
11	BPPP Ambon	BPPSDMKP	2023
12	BPPP Banyuwangi	BPPSDMKP	2018
13	Politeknik AUP Jakarta	BPPSDMKP	2022
14	Politeknik KP Pangandaran	BPPSDMKP	2023
15	Politeknik KP Sidoarjo	BPPSDMKP	2023

C. Ditjen PKRL

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	BKKPN Kupang	DJPRL	2019
2	BPSPL Denpasar	DJPRL	2018
3	BPSPL Makassar	DJPRL	2017
4	BPSPL Padang	DJPRL	2019
5	BPSPL Pontianak	DJPRL	2017
6	LKKPN Pekanbaru	DJPRL	2020
7	LPSPL Sorong	DJPRL	2021
8	LPSPLSerang	DJPRL	2020

D. Ditjen Perikanan Tangkap

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Balai Besar Penangkapan Ikan	DJPT	2017
2	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	DJPT	
3	PPN Brondong	DJPT	2019
4	PPN Kejawanan	DJPT	2020
5	PPN Palabuhanratu	DJPT	2022
6	PPN Pekalongan	DJPT	2020
7	PPN Pemangkat	DJPT	
8	PPN Prigi	DJPT	2019
9	PPN Sibolga	DJPT	2017
10	PPN Sungailiat	DJPT	2019
11	PPN Tanjung Pandan	DJPT	2023
12	PPN Teluk Batang	DJPT	2023
13	PPS Bitung	DJPT	2020
14	PPS Cilacap	DJPT	2021
15	PPS Kendari	DJPT	2021

E. Ditjen PSDKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Pangkalan PSDKP Batam	DJPSPDKP	2020
2	Pangkalan PSDKP Bena	DJPSPDKP	2019
3	Pangkalan PSDKP Bitung	DJPSPDKP	2018
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	DJPSPDKP	2019
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	DJPSPDKP	2021
6	Pangkalan PSDKP Tual	DJPSPDKP	2020
7	Stasiun PSDKP Ambon	DJPSPDKP	2023
8	Stasiun PSDKP Belawan	DJPSPDKP	2021
9	Stasiun PSDKP Biak	DJPSPDKP	2023
10	Stasiun PSDKP Cilacap	DJPSPDKP	2021
11	Stasiun PSDKP Kupang	DJPSPDKP	2022
12	Stasiun PSDKP Pontianak	DJPSPDKP	2021
13	Stasiun PSDKP Tahuna	DJPSPDKP	2022
14	Stasiun PSDKP Tarakan	DJPSPDKP	2022

F. Ditjen PDSPKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	DJPDS	2019
2	Direktorat Logistik	DJPDS	2017
3	Direktorat Pemasaran	DJPDS	2023
4	Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	DJPDS	2020
5	Direktorat Usaha dan Investasi	DJPDS	2020

G. Ditjen Perikanan Budi Daya

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	DJPB	
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	DJPB	2020
3	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	DJPB	2021
4	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	DJPB	2022
5	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	DJPB	2018
6	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam	DJPB	2022
7	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	DJPB	2017
8	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	DJPB	2019
9	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	DJPB	2022
10	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem	DJPB	2020
11	BPBAP Jepara	DJPB	2018
12	BPBAP Takalar	DJPB	2023
13	BPBAP Ujung Batee	DJPB	2023

H. BPPMHKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	BBKIPM Jakarta I	BPPMHKP	2022
2	BBKIPM Makassar	BPPMHKP	
3	BKIPM Ambon	BPPMHKP	2022
4	BKIPM Balikpapan	BPPMHKP	2022
5	BKIPM Banjarmasin	BPPMHKP	2021
6	BKIPM Denpasar	BPPMHKP	
7	BKIPM Entikong	BPPMHKP	2021
8	BKIPM Jakarta II	BPPMHKP	
9	BKIPM Lampung	BPPMHKP	2023
10	BKIPM Manado	BPPMHKP	2018
11	BKIPM Mataram	BPPMHKP	2021
12	BKIPM Medan I	BPPMHKP	2022
13	BKIPM Medan II	BPPMHKP	2023
14	BKIPM Merak	BPPMHKP	2023
15	BKIPM Pangkalpinang	BPPMHKP	2023
16	BKIPM Semarang	BPPMHKP	
17	BKIPM Surabaya I	BPPMHKP	2020
18	BKIPM Surabaya II	BPPMHKP	
19	BKIPM Tarakan	BPPMHKP	2022
20	BUSKIPM	BPPMHKP	2021
21	SKIPM Batam	BPPMHKP	2022
22	SKIPM Cirebon	BPPMHKP	2021
23	SKIPM Pekanbaru	BPPMHKP	2021
24	SKIPM Yogyakarta	BPPMHKP	2022

Lampiran 2. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tahun 2023

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan penilaian internal oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit dan hasil serta pengujian implementasi terhadap pembangunan zona integritas periode 2022 sampai dengan September 2023.
- KETIGA : Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi oleh tim penilai internal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2023

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

NO.	UNIT KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
3.	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
4.	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
5.	Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon
7.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
8.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
9.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
10.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
11.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung
12.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang
13.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II
14.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana